

ANTARA NEWS BALI

Mencerahkan, Memberdayakan, Mendukung, Nasionalisme



JAMKRIDA BALI MANDARA RAIH

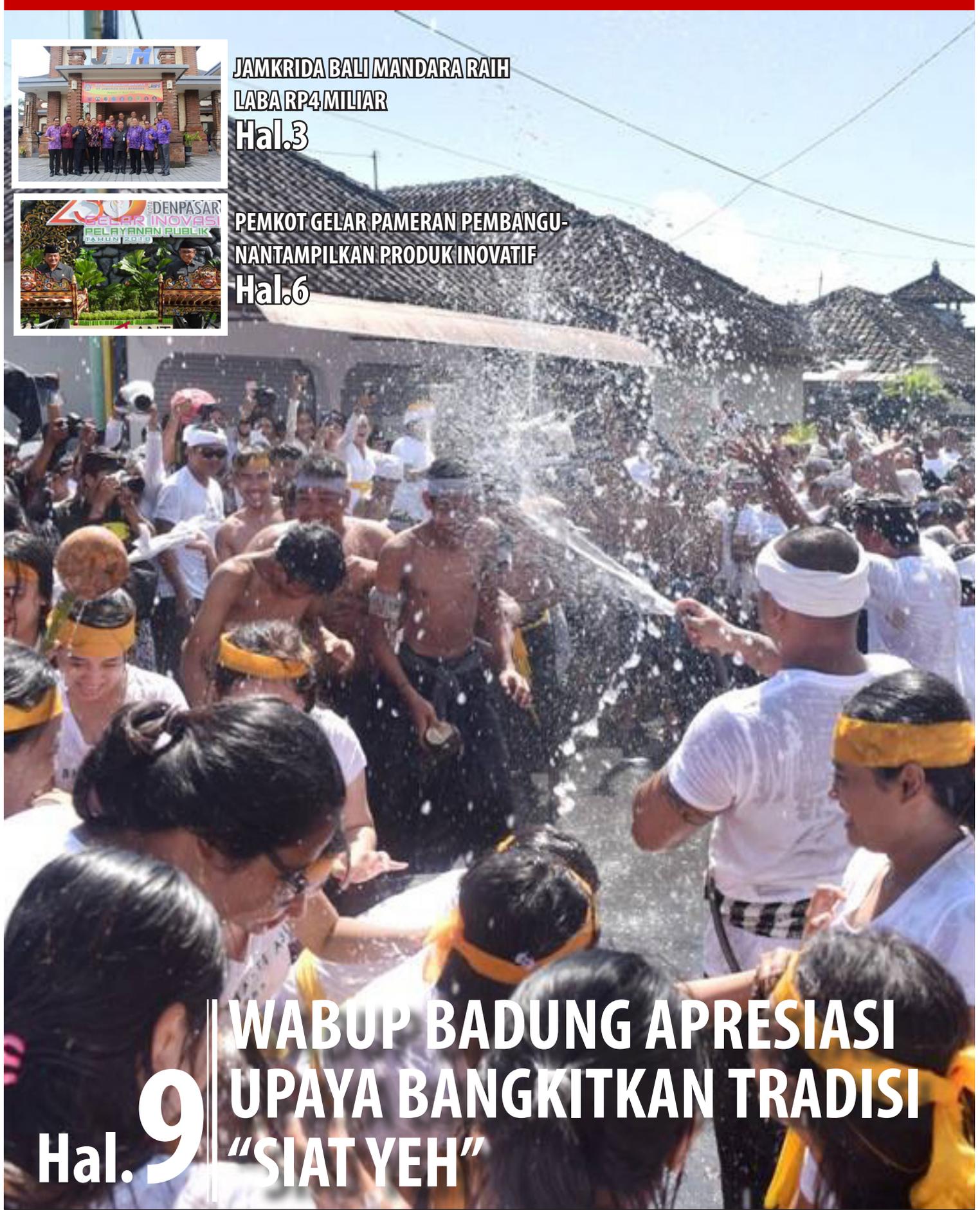
LABA RP4 MILIAR

Hal.3



PEMKOT GELAR PAMERAN PEMBANGUNAN TAMPILKAN PRODUK INOVATIF

Hal.6



Hal. 9 | **WABUP BADUNG APRESIASI UPAYA BANGKITKAN TRADISI "SIAT YEH"**

Pemprov Bali Optimistis Raih Opini WTP

Pemerintah Provinsi Bali optimistis mampu mempertahankan dan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2017.

“Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Bali berkomitmen penuh untuk taat pada aturan dan menunaikan kewajiban menyampaikan laporan keuangan,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dalam acara Penyerahan Laporan Keuangan Unaudited Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017, di Denpasar, Kamis.

Menurut dia, kewajiban untuk menyusun laporan keuangan bukan semata bertujuan memenuhi kewajiban konstitusi. Lebih dari itu, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat.

“Melalui penyusunan laporan keuangan yang baik dan memenuhi amanat UU, rakyat akan yakin dan percaya kalau uang yang mereka setor dalam

bentuk pajak dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik oleh pemerintah,” ucapnya.

Dewa Indra mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota di Bali untuk berusaha melaksanakan pengelolaan keuangan dengan sebaik-baiknya dan seluruh-lurusnya.

Dia berkeyakinan, pemerintah kabupaten/kota juga punya komitmen untuk mengelola keuangan daerah dengan baik agar bermanfaat bagi upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di wilayah masing-masing.

Pihaknya optimistis opini Wajar Tanpa Pengecualian yang telah diterima pemprov setempat dalam beberapa tahun berturut-turut dapat dipertahankan.

Kepala BPK RI Perwakilan RI Yulindra Tri Kusumo Nugroho menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas komitmen Pemerintah Provinsi Bali dan kabupaten/kota se-Bali untuk menyerahkan laporan keuangan tahun anggaran 2017.

Selanjutnya, BPK RI Per-



Foto bersama setelah acara Penyerahan Laporan Keuangan Unaudited Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 di Ruang Pertemuan Kantor BPK RI Perwakilan Bali, Kamis (Foto Humas Pemprov. Bali)

wakilan Bali akan melaksanakan audit dalam kurun waktu 30 hari. “Pada bulan Juni, hasil audit akan kami serahkan kepada lembaga legislatif untuk dijadikan pertimbangan dalam penilaian laporan pertanggungjawaban kepala daerah. Lebih dari itu, hasil audit dapat dijadikan bahan evaluasi oleh lembaga eksekutif,” ucapnya.

Selain itu, Yulindra menyampaikan pemberian opini dalam

proses audit sebagai penilaian terhadap tingkat kewajaran laporan keuangan yang disampaikan entitas yang menjadi objek pemeriksaan BPK.

Acara penyerahan Laporan Keuangan Unaudited Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 dihadiri bupati/wali kota se-Bali atau yang mewakili dan pimpinan organisasi perangkat daerah terkait. (Ant)

Pemprov Bali : UU Kepalangmerahan Tegaskan Fungsi PMI



Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat memimpin apel disiplin di Denpasar. (Foto Humas Pemprov. Bali)

Pemerintah Provinsi Bali mengharap dengan dikeluarkannya UU No 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, dapat menegaskan kedudukan, fungsi dan peran Palang Merah Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

“UU ini juga akan memberikan perlindungan hukum kepada sukarelawan PMI maupun sukarelawan kemanusiaan dari organisasi lainnya. PMI adalah

sebuah organisasi yang bergerak dalam sosial kemanusiaan dan diakui secara luas kenetralannya,” kata Kepala Biro Kesjahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali AA Gede Geriya saat membacakan sambutan Gubernur Bali, di Denpasar, Kamis.

Untuk itu, dengan UU tersebut, lanjut Geriya, maka pelayanan PMI kepada masyarakat yang membutuhkan akan lebih profesional, berkualitas, cepat,

tepat dan lebih luas.

“Selain itu, melalui sosialisasi UU Kepalangmerahan dapat meningkatkan kemampuan dalam upaya kesiapsiagaan penanganan bencana, mengingat PMI mempunyai tugas mulai yaitu membantu pemerintah dalam penanganan bencana khususnya kesiapsiagaan bencana,” ujarnya pada acara sosialisasi tersebut.

Pemprov Bali, lanjut dia, mengapresiasi atas dikeluarkannya UU No 1 Tahun 2018, sehingga diharapkan UU tersebut akan menegaskan kedudukan, fungsi dan peran Palang Merah Indonesia (PMI) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, baik sebagai lembaga yang mendukung tugas Pemerintah untuk menyediakan berbagai pelayanan kepalangmerahan maupun sebagai anggota gerakan.

Sementara itu, Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Bali I Gusti Bagus Alit Putra dalam

sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Pengurus PMI Provinsi Bali Drs I Nyoman Puasa Aryana mengatakan bahwa latar belakang diterbitkannya UU No 1/2018 i kerana banyaknya terjadi penyalahgunaan lambang Palang Merah di Indonesia.

Belakangan, semua pihak baik individu maupun kelompok dapat dengan bebas mempergunakan lambang Palang Merah untuk itu, sehingga PMI yang memiliki karakter “netral” tidak dianggap lagi kenetralannya.

Dalam perjuangan pengesahan RUU Kepalangmerahan menjadi UU, PMI Provinsi Bali beserta jajaran PMI Kabupaten/Kota se-Bali telah berusaha maksimal dengan berbagai aksi dan kegiatan mulai dari penggalangan tanda tangan, kampanye, aksi simpatik sampai dengan aksi turun ke jalan untuk menggelorakan pengesahan RUU menjadi UU Kepalangmerahan. (Ant)

Jamkrida Bali Mandara Raih Laba Rp4 miliar



PT JBM telah berhasil menembus laba 4,035 Miliar rupiah. Hal ini terungkap saat PT JBM menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) di ruang rapat PT Jamkrida Bali Mandara, Denpasar. (Foto Humas Pemprov. Bali)

Direktur Utama PT Jamkrida Bali Mandara (JBM) I Ketut Widiana Karya mengatakan lembaga penjaminan kredit daerah milik Pemprov Bali yang dipimpinya berhasil meraih laba hingga Rp4,035 miliar pada 2017.

"Tahun lalu yang merupakan tahun ke-7 berdirinya PT JBM, tentu saja banyak tantangan dan perubahan yang dihadapi. Namun,

syukur berkat kerja sama dengan berbagai pihak hal tersebut dapat diatasi," kata Widiana Karya, di Denpasar, Rabu.

Widiana Karya menambahkan, pada 2017 PT JBM juga telah berhasil menembus aset Rp173,947 miliar dengan total saham Rp130,5 miliar. Dengan laba yang terus meningkat dari tahun ketahun, dan di tahun 2017

PT JBM telah menembus laba Rp4,035 miliar.

Hal tersebut diperoleh dari semakin meningkatnya penjaminan yang dilakukan oleh PT JBM bekerjasama dengan 378 partner usaha terdiri dari 51 Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali (pusat, cabang dan cabang pembantu), 1 Bank Andara Cabang Denpasar, 1 Bank Bukopin Cabang Denpasar, 1 PT Sarana Bali Ventura, 86 Bank Perkreditan Rakyat (BPR), 57 koperasi, 170, 10 badan usaha desa dan 1 Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir.

Dari mitra usaha tersebut, jumlah nasabah terjamin PT JBM sampai 2017 adalah 42.229 terjamin dengan plafon kredit Rp5,7 triliun. Dari total penjaminan itu, 59,59 persen merupakan penjaminan sektor produktif.

Sedangkan saham Pemerintah Provinsi Bali pada PT JBM sebesar Rp120 miliar, serta saham Pemkab dan Pemkot se-Bali sebesar Rp10,075 miliar.

Pada Rapat Umum Pemegang

Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang telah digelar pada Selasa (27/3) juga terdapat setoran saham yang diresmikan, diantaranya setoran saham oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan pada tanggal 13 November 2017 dengan setoran saham sebesar Rp200 juta, Klungkung pada tanggal 20 November 2017 dengan setoran sebesar Rp200 juta dan Buleleng pada tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp100 juta.

"Menjawab komitmen dan kepercayaan yang telah diberikan pemegang saham, PT JBM pun berhasil terus meningkatkan dividen. Pada tahun ini dividen yang direalisasikan meningkat signifikan. Pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp783.203.894 dan pada tahun ini Rp1.008.836.854," kata Widiana Karya.

"Pada tahun 2018 PT JBM akan memberikan pelayanan langsung kepada principal yang memerlukan jasa/produk Surety Bond dan Kontra Bank Garansi," ujarnya. (Ant)

Gubernur Bali Harapkan Transfer Dana Pusat Dipercepat

Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengharapkan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah dapat dipercepat sehingga pelaksanaan pembangunan bisa lebih optimal.

"Peraturan Presiden tentang rincian APBN yang memuat alokasi transfer ke daerah seringkali baru diterima daerah pada pertengahan bulan Desember," kata Pastika saat menerima kunjungan kerja Badan Anggaran DPR RI, di Kuta, Kabupaten Badung, Selasa.

Oleh karena itu, dia mengusulkan agar proses penetapan UU tentang APBN dapat dipercepat sehingga Perpres bisa disampaikan lebih awal dan proses perencanaan dan penganggaran di daerah bisa lebih optimal.

Pastika juga menyoroti dana transfer umum yang bersifat dinamis karena penyalurannya disesuaikan dengan penerimaan negara. Menurutnya hal ini mem-

bawa dampak di daerah yang sumber pembiayaan pembangunannya bersumber dari dana transfer pusat.

"Apabila dana transfer pusat tidak tercapai, sedangkan di daerah terhadap belanja-belanja yang pendanaannya sudah ditentukan bersumber dari transfer pemerintah pusat akan berpotensi risiko tidak dapat dilaksanakan," ucapnya.

Pastika mengusulkan agar sifat dinamis dana transfer ini ditinjau ulang agar terdapat kepastian pelaksanaan pembangunan di daerah.

Terkait dana desa, mantan Kapolda Bali juga berharap rincian alokasi dana desa bisa disampaikan lebih awal sehingga pemanfaatan dana desa tidak mengalami keterlambatan.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Bali juga menyampaikan harapannya agar Bali mendapat dana perimbangan



Gubernur Bali Made Mangku Pastika setelah menghadiri Sidang Paripurna DPRD Bali, di Denpasar. (Antaraneews Bali/Ni Luh Rhisma)

lebih. Menurutnya meski tak memiliki sumber daya alam, Bali menyumbang devisa yang besar.

"Pemerintah Provinsi Bali hanya mengandalkan pajak kendaraan, padahal Bali harus merawat adat dan budaya serta mengatasi ketimpangan pembangunan di Bali," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR RI Aziz Syamsuddin mengapresiasi masukan yang disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika beserta jajaran pemerintah yang hadir. Menurutnya masukan ini akan disampaikan dalam rapat DPR RI dengan pemerintah pusat. (Ant)

Pastika: Advokat Senior Beri Pembelaan Hukum Gratis



Arsip Foto- Gubernur Bali Made Mangku Pastika . (Antaraneews Bali via Humas Pemprov Bali)

Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengharapkan agar para advokat senior dapat memberikan pembelaan hukum gratis untuk warga miskin.

“Kita harus membela masyarakat miskin. Kalau tidak, itu artinya tidak pro terhadap masyarakat miskin,” kata Pastika saat menjadi narasumber serangkaian Puncak

Perayaan HUT ke-11 DPC Peradi Denpasar, di Denpasar, Jumat.

Menurut dia, penghinaan kalau orang miskin diberikan pelayanan yang belum baik dan meyakini banyak advokat senior yang mau membela warga miskin secara gratis.

“Warga miskin harus mendapatkan pelayanan hukum terbaik dan salah satunya adalah pembelaan yang baik. Saya sepakat jika advokat senior memberi pembelaan hukum gratis untuk warga miskin,” ucap mantan Kapolda Bali itu.

Pastika khawatir warga miskin datang ke kantor polisi saja takut karena tak ingin berurusan dengan hukum. Itu sebabnya, ia berharap Peradi membuat peraturan agar orang miskin yang tidak mampu harus didampingi advokat senior.

Secara khusus, dalam rangka

HUT ke-11, Pastika berharap kepada para advokat di Bali tidak berhenti belajar dan mencermati perubahan yang terjadi.

Talk Show dengan tema “Peran Advokat dalam Penanganan Perkara Pidana” yang dipandu Ketua DPC Peradi Denpasar Nyoman Budi Adnyana juga menghadirkan narasumber berskala nasional yakni Ketua Dewan Pembina Peradi Otto Hasibuan dan advokat senior Wayan Sudirta.

Pada kesempatan ini Ketua Dewan Pembina Peradi mengusulkan agar Gubernur Bali Made Mangku Pastika bisa diusulkan menjadi anggota kehormatan Peradi.

Menurut dia, hal ini dimungkinkan dalam AD/ART bagi orang yang memberikan perhatian dan berjasa dalam penegakan hukum. (Ant)

Gubernur Apresiasi Bali Sebagai Pusat Arbitrase Internasional

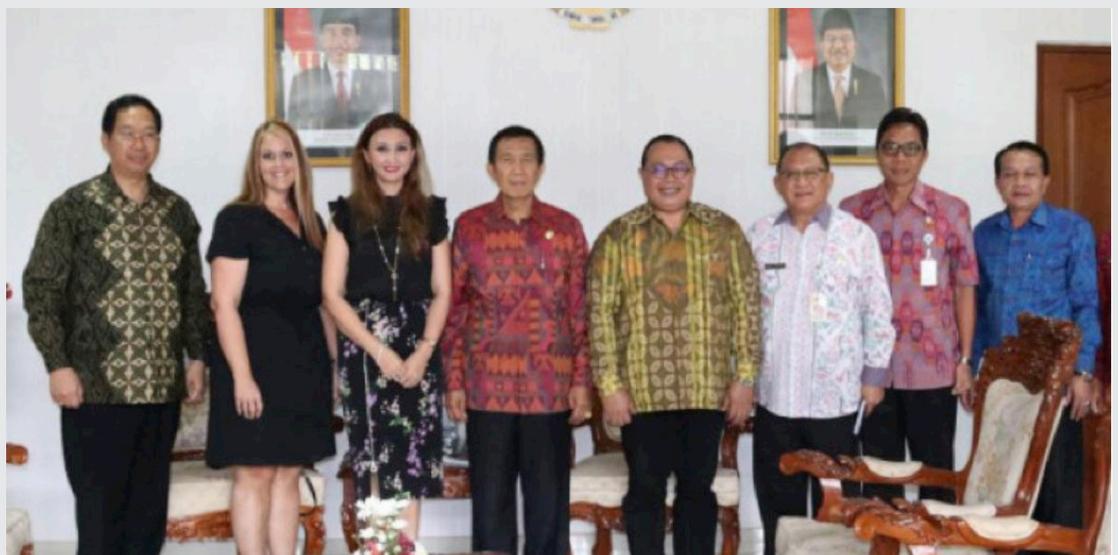
Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengapresiasi dipilihnya daerah itu sebagai tempat berdirinya Pusat Arbitrase dan Mediasi Internasional yang menunjukkan semakin menambah deretan kepercayaan dunia pada Bali.

“Ini merupakan bentuk kepercayaan dunia internasional kepada Bali. Berdasarkan pengalaman, vibrasi, kenyamanan dan keamanan Pulau Bali memang cocok untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan,” kata Pastika saat menerima pengurus “Bali International Mediation and Arbitration Center” (BIMAC), di Denpasar, Kamis.

Mantan Kapolda Bali itu berharap dengan keberadaan Pusat Arbitrase dan Mediasi Internasional ini akan membuat citra Bali di mata internasional bertambah baik.

“Bali selama ini sudah banyak mendapatkan kepercayaan menjadi tuan rumah konferensi internasional dan menjadi rumah bagi organisasi internasional,” ujar Pastika.

Sementara itu, Presiden BIMAC Naz Juman Gulinzaer mengatakan



Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat menerima pengurus “Bali International Mediation and Arbitration Center” (BIMAC), di Denpasar. (Antaraneews Bali via Humas Pemprov Bali/2018)

pemilihan Bali sebagai tempat penyelesaian masalah arbitrase dan mediasi merupakan kesepakatan dari para pendiri yang berasal dari berbagai negara.

Tentunya, dia berharap, pemerintah memberikan dukungan terhadap keberadaan organisasi ini. Menurutnya BIMAC sudah memiliki “tagline” yang berbunyi “Find Resolution and Paradise”.

“Sudah banyak arbitrator inter-

nasional yang menyatakan berniat bergabung bersama kami tapi kami harus melakukan seleksi agar mendapatkan yang terbaik,” katanya.

Salah satu pendiri BIMAC, Prof Dr Ida Bagus Rahmadi Supancana mengatakan kelahiran BIMAC merupakan ide dari beberapa arbitrator internasional yang di antaranya berbasis di Jerman, Hong Kong, Malaysia dan Indonesia. BI-

MAC akan berfokus menyelesaikan sengketa hukum yang bertaraf internasional.

Hadir pula dalam kesempatan itu, pendiri BIMAC yang juga akademisi dari Universitas Udayana Prof Dr Ida Bagus Wyasa Putra, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali dan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali. (Ant)

Pemkot Denpasar Imbau Warga Tertib Laporkan Pajak



Sekretaris Kota Denpasar Anak Agung Ngurah Rai Iswara di Denpasar. (Foto Humas Pemkot Denpasar/2018)

Pemerintah Kota Denpasar, Bali, mengimbau masyarakat agar tertib membayar dan melaporkan pajak penghasilan, karena warga untuk pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) dapat melalui sistem berjaringan atau "e-filing".

"Warga yang ingin melaporkan SPT bisa melalui sistem `online` atau berjaringan (e-filing). Kemu-

dahan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak agar masyarakat tertib membayar pajaknya," kata Sekretaris Kota Denpasar Anak Agung Ngurah Rai Iswara di sela kampanye simpati "SpecTAXcular 2018" di Lapangan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajra Sandhi, Renon, Kota Denpasar, Bali, Minggu.

Ia mengatakan kelancaran

membayar pajak dari warga masyarakat adalah bertujuan untuk meningkatkan pembangunan, sebab dari pajak tersebut menjadi dana APBN.

"Oleh karena itu kami imbau warga masyarakat Denpasar, dan Bali umumnya agar taat membayar dan melaporkan SPT tahunannya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali Goro Ekanto mengatakan tujuan acara tersebut untuk memberitahukan kepada masyarakat terkait batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh orang pribadi.

Ia mengimbau wajib pajak untuk memanfaatkan sarana pelaporan SPT secara elektronik melalui e-filing untuk menghindari antrian panjang yang biasa terjadi di akhir-akhir periode pelaporan SPT di kantor pelayanan pajak.

Goro Ekanto menjelaskan sistem "e-filing" merupakan salah satu sarana yang disediakan oleh

DJP untuk mempermudah pelaporan SPT Tahunan yang dapat diakses melalui alamat website www.djponline.pajak.go.id.

Menurut dia, adapun tema kegiatan simpati tersebut adalah "Pajak, bayarnya e-billing, lapornya e-filing". Semua itu bertujuan untuk mengingatkan masyarakat, khususnya wajib pajak terkait batas akhir penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2017 yang jatuh tempo pada 31 Maret 2018.

Dikatakan, pada kegiatan ini masyarakat dapat menikmati berbagai layanan perpajakan dan juga sekaligus hiburan yang telah disediakan oleh Kanwil DJP Bali. Salah satunya adalah layanan pokok pajak yang merupakan sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan perpajakan seperti layanan pelaporan SPT Tahunan secara elektronik melalui e-filing, pembuatan kode billing, permohonan EFIN dan konsultasi perpajakan. (ant)

ASN Denpasar Wajib Terapkan Implementasi

Seluruh aparatur sipil negara lingkup Pemerintah Kota Denpasar, Bali, wajib mengikuti pedoman dalam setiap pembangunan yaitu akselerasi dan implementasi "Padmaksara".

"Saat ini Kota Denpasar sudah menginjak usia ke-230, karena itu semua ASN dalam menjalankan tugas-tugas dan kewajiban pelayanan kepada masyarakat berpedoman seperti pada tema HUT Kota Denpasar, yakni `Akselerasi dan Implementasi Padmaksara`," kata Sekretaris Kota Denpasar Anak Agung Rai Iswara, Senin.

Sekda Kota Denpasar menegaskan hal itu pada apel rutin bulanan di jajaran ASN Pemkot Denpasar di Lapangan Lumintang, Kecamatan Denpasar Utara, Bali.

Hal tersebut, kata dia, langkah yang menjadi suatu pedoman sekaligus tujuan bagi ASN di lingkungan Pemkot Denpasar

dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, serta mampu menyejahterakan warga masyarakat.

"Inilah yang menjadi tugas kita bersama, yakni mewujudkan seperti yang tertuang dalam tema HUT ke-230 Kota Denpasar tahun 2018 yang berlandaskan pada upaya mewujudkan `Padmaksara`," ujarnya.

Lebih lanjut Rai Iswara mengatakan di usia yang ke-230 Kota Denpasar telah mampu mendulang berbagai prestasi tingkat daerah dan nasional.

Walaupun demikian, kata dia, tentu semua jajaran ASN di lingkungan Pemkot Denpasar wajib melaksanakan evaluasi dalam upaya penuntasan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan "Padmaksara" tersebut.

"Seluruh ASN dan pegawai di lingkungan Pemkot Denpasar untuk memahami rencana



Sekretaris Kota Denpasar Anak Agung Rai Iswara saat memimpin apel rutin bulanan di jajaran ASN Pemkot Denpasar di Lapangan Lumintang, Kecamatan Denpasar Utara, Bali. (Foto Pemkot Denpasar/2018)

kegiatan yang telah ditetapkan, termasuk juga dalam rencana kerja pembangunan jangka menengah," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Rai Iswara, mewakili Pemkot Denpasar menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran perangkatan daerah, swasta, dan masyarakat Kota Denpasar yang telah mendukung suksesnya pelaksanaan

Peringatan HUT ke-230 kota tersebut yang telah berlangsung sukses.

"Kami atas nama Pemkot Denpasar menyampaikan terima kasih kepada warga masyarakat dan semua pihak yang telah mendukung suksesnya pelaksanaan HUT ke-230 Kota Denpasar dan berbagai pencapaian prestasi hingga saat ini," katanya. (ant)

Pengunjung Pameran HUT Denpasar Capai 5.000 Orang/Hari



Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara menandatangani pelaksanaan Pameran Pelayanan Publik di Denpasar, ditandai dengan penyerahan penghargaan pada stan terbaik. (Antaraneews Bali via Humas Pemkot Denpasar/2018)

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar mencatat pengunjung Pameran Pelayanan Publik dalam rangka peringatan HUT Ke-230 Kota Denpasar sejak 27 Februari hingga 3 Maret 2018 mencapai 5.000 orang/hari.

“Sejak dibuka secara resmi oleh Plt. Walikota Denpasar IGN Jaya Negara, pameran mendapat

sambutan antusias dari masyarakat dengan tingkat kunjungan masyarakat mencapai kurang lebih 5.000 orang setiap harinya,” kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar Dewa Made Agung selaku Ketua Panitia di Denpasar, Senin.

Menurut dia, pameran itu merupakan bentuk komunikasi dan informasi Pemerintah Kota

Denpasar pada masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini.

“Pameran ditutup Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara dengan ditandai penyerahan penghargaan pada stan terbaik. Sekda Kota Denpasar menilai pameran ini akan memotivasi ASN bahwa inovasi sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Kedepan, dengan adanya komunikasi langsung dengan masyarakat, maka Pemerintah Kota Denpasar dapat cepat mengambil langkah-langkah terkait dengan permasalahan yang ada di lapangan.

“Dengan adanya pameran pelayanan publik ini, pemerintah dapat menginformasikan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Denpasar, sehingga bisa juga mendapatkan masukan langsung dari masyarakat,” katanya.

Pameran Pelayanan Publik itu dipadukan dengan berbagai

macam kuliner yang ditawarkan UMKM di Kota Denpasar semakin menambah daya tarik dari pelaksanaan pameran ini.

Selain itu, pameran juga mendapatkan dukungan dari generasi muda di Kota Denpasar yang terwadahi dalam Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kota Denpasar. Pasukan paskibraka itu telah menyukseskan pelaksanaan upacara bendera berkaitan HUT ke-230 Kota Denpasar.

Menurut Ketua PPI Kota Denpasar Made Edi Agustina, pihaknya sudah semestinya mendukung kegiatan Pemkot Denpasar, karena pemerintah kota selama ini juga mendukung kegiatan PPI di beberapa kabupaten, seperti Kabupaten Badung, Tabanan, Gianyar dan Jembrana.

“Kedepannya, kami berharap Pemerintah Kota Denpasar terus memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan PPI Kota Denpasar, karena pembinaan generasi muda juga merupakan tugas pemerintah,” ujarnya. (ant)

Pemkot Gelar Pameran Pembangunan Tampilkan Produk Inovatif

Pemerintah Kota Denpasar, Bali, menyelenggarakan pameran pembangunan serangkaian merayakan HUT ke-230 pemkot setempat di kawasan Taman Kota, Niti Praja Lumintang, Kecamatan Denpasar Utara.

“Pameran tersebut melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) dan partisipasi warga masyarakat. Berbagai produk inovatif ditampilkan dalam pameran ini seperti mengelola sampah plastik menjadi nilai produk yang bernilai jual tinggi,” kata Penjabat Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara di sela-sela pembukaan pameran tersebut di Denpasar, Bali, Selasa.

Jaya Negara lebih lanjut mengatakan inovasi yang dipamerkan dan diciptakan masyarakat Denpasar akan menjadi pembahasan dengan anggota DPRD Kota Denpasar.

Sehingga dapat menjadi sarana pemasaran inovasi ke depannya.

“Berbagai inovasi yang telah diciptakan oleh warga seperti tempat buah, tempat bunga dan lain sebagainya memiliki nilai ekonomis dan bermanfaat bagi masyarakat. Kami akan segera mencari pasar untuk menjual inovasi yang telah diciptakan masyarakat,” ujarnya.

Jaya Negara menambahkan bahwa pameran inovasi itu juga sangat bermanfaat bagi masyarakat karena dapat memberikan berbagai informasi yang dilakukan perangkat daerah Pemerintah Kota Denpasar, seperti halnya anjungan lalu lintas Kota Denpasar, tata cara pengurusan izin, pengembangan bibit ikan dan lainnya.

Sekretaris Kota Denpasar Anak Agung Rai Iswara mengatakan pameran inovasi tersebut mengangkat tema “Inovasi dan Kreativitas menuju Pelay-



Penjabat Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara di sela-sela pembukaan pameran tersebut di Denpasar. (Antaraneews Bali via Humas Pemkot Denpasar/2018)

anan Prima”.

Ia mengatakan pameran yang diikuti 90 peserta merupakan agenda rutin tahunan, dengan melibatkan segenap OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar termasuk juga perusahaan daerah setempat. Hal tersebut diharapkan dapat menginformasikan pelayanan

dan inovasi terbaru yang dimiliki UKM kepada masyarakat.

“Masyarakat diharapkan dapat mengunjungi pameran inovasi ini sehingga mengetahui dan melihat secara langsung berbagai inovasi yang diciptakan Pemerintah Kota Denpasar dalam meningkatkan pelayanan,” ujarnya. (ant)

DPRD Badung Setujui Ranperda Perlindungan Petani



Badung, Bali, I Nyoman Giri Prasta (kiri) saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Badung. (Antaraneews Bali via Humas Pemkab Badung/2018)

Empat fraksi di DPRD Kabupaten Badung, Bali, menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjadi perda dalam Rapat Paripurna DPRD Badung, Selasa.

Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani itu meru-

upakan salah satu dari enam Ranperda yang disetujui DPRD setempat, yakni Ranperda tentang dana bergulir, Ranperda Penamaan dan Lambang RSUD, dan Ranperda Badan Permusyawaratan Desa.

Selanjutnya, Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan

Ranperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu juga ada pencabutan Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang izin gangguan.

Keempat fraksi itu mengucapkan terima kasih kepada Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta yang telah menerima Ranperda Inisiatif DPRD tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjadi Perda.

Pandangan umum Fraksi Demokrat yang dibacakan I Made Retha mengatakan, fraksi Demokrat sangat mendukung enam Ranperda menjadi Perda karena sudah berdasarkan pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif.

“Oleh karena itu, kami Fraksi Demokrat DPRD Badung dapat menyetujui enam Ranperda tersebut menjadi Perda,” ujar I Made Retha.

Fraksi PDI Perjuangan, melalui pandangan umum yang

dibacakan Alit Yandinata juga menyatakan menyetujui dan mendukung enam Ranperda tersebut.

“Dari enam Ranperda tersebut, kami Fraksi PDI Perjuangan sepakat dan menyetujui karena telah melalui proses pembahasan di dewan untuk ditindaklanjuti mendapatkan verifikasi dari Gubernur untuk menjadi Perda,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh dua fraksi lain, yaitu fraksi Gerindra melalui I Gede Aryantha dan fraksi Golkar yang disampaikan oleh I Wayan Suyasa.

Sementara itu, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Badung yang telah melaksanakan amanat konstitusi dengan memberikan jawaban lewat pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan Bupati Badung. (Adv)

Pemkab Badung Bidik Wisatawan Asal Jerman

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, membidik wisatawan asal Jerman untuk mengunjungi Pulau Bali, khususnya objek wisata di wilayah Kabupaten Badung pada tahun 2018.

“Tahun ini kunjungan wisatawan Jerman kami harapkan dapat mencapai angka 230.340 orang wisatawan atau naik 30 persen dibandingkan dengan tahun 2017,” ujar Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, I Made Badra, dalam keterangan pers yang diterima Antara di Mangupura, Badung, Kamis.

I Made Badra menjelaskan, jumlah kunjungan wisatawan Jerman pada tahun 2017 mencapai 177.184 orang atau meningkat 15,11 persen dari tahun 2016 yang berjumlah 153.925 orang.

“Kunjungan wisatawan Jerman yang datang ke Bali pada tahun 2017 menduduki peringkat delapan setelah China, Australia, India, Jepang, Inggris, Amerika, dan Perancis. Hal itu yang mem-

buat kami optimistis bahwa kunjungan wisatawan Jerman dapat terus meningkat,” ujarnya.

Made Badra mengatakan, terdapat sejumlah tantangan dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan asal Jerman, yaitu selama ini warga Jerman lebih memilih berwisata dengan perjalanan yang dekat (short houl) menuju kota wisata dunia di Eropa dan Timur Tengah.

“Wisatawan Jerman selama ini banyak yang memilih berwisata jarak dekat seperti ke Spanyol, Yunani, Turki dan Bulgaria. Tentunya ini menjadi tantangan kami untuk dapat merebut perhatian mereka agar bisa langsung ke Bali, khususnya ke Badung,” katanya.

Ia menjelaskan, berbagai upaya telah dilakukan untuk membidik wisatawan Jerman agar datang ke Bali. Salah satunya dengan mengirimkan tim promosi pariwisata Badung mengikuti kegiatan Internationale Tourismus-Borse (ITB)



Rombongan sales mission promosi pariwisata dipimpin Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, Ir. I Made Badra, MM, Ketua BPPD Badung IGN Rai Suryawijaya, SE, MBA, dengan tim Dr. Ni Made Eka Mahadewi, dan Herdy Sayoga (Foto Humas Pemkab. Badung)

Berlin di Jerman pada 7-14 Maret.

“ITB Berlin tersebut merupakan salah satu bentuk promosi pariwisata kami secara langsung kepada wisatawan Eropa, khususnya wisatawan asal Jerman, agar mereka mau datang berwisata ke Pulau Bali,” katanya.

Selama di Jerman, tim juga melakukan agenda promosi lainnya di Pullman Hotel Munich,

Jerman, yaitu menggelar kegiatan pertemuan makan malam sajian masakan Nusantara dengan undangan `buyer` dari `wholesaler` dan biro perjalanan.

“Dengan berbagai upaya tersebut, kami harap pertumbuhan wisatawan Jerman ke Bali dan ke berbagai objek wisata di kawasan Badung dapat terus meningkat,” kata I Made Badra. (Adv)

Bupati Badung Dukung Desa Gali Inovasi-Potensi



Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta saat menghadiri perayaan HUT ke-16 Desa Mekar Bhuana di Lapangan Tingas, Badung. (Antaraneews Bali via Humas Pemkab Badung/2018)

Bupati Badung, Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyatakan pihaknya mendukung desa-desa di Badung untuk terus berinovasi dan menggali potensi wilayahnya.

Informasi dari Humas Badung yang diterima Antara di Mangupura, Senin, melaporkan hal itu disampaikan bupati saat meng-

hadiri perayaan HUT ke-16 Desa Mekar Bhuana di Lapangan Tingas, Minggu (11/3) malam.

Pemkab Badung juga memiliki komitmen untuk mewujudkan desa-desa di wilayah Badung yang mandiri dan terus berkembang.

“Saya mendorong setiap desa dapat terus berinovasi dan me-

maksimalkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa,” ujarnya.

Bupati Giri Prasta mengharapkan setiap desa juga dapat berdiri atau berdiri di atas kaki (kemampuan) sendiri dan menjadi tuan di rumah sendiri.

“Saya juga sangat mendukung perayaan HUT desa ini karena dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat di Desa Mekar Bhuana,” ujarnya.

Bupati Giri Prasta menjelaskan, Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) Pemkab Badung menetapkan lima program prioritas pembangunan.

Kelimitya adalah pangan, sandang dan papan; kesehatan dan pendidikan; jaminan sosial dan ketenagakerjaan; seni, adat, agama dan budaya; serta pariwisata.

“Program-program prioritas ini merupakan upaya Pemkab Badung dalam memenuhi kebutu-

han dasar masyarakat dan meredakan beban masyarakat,” kata Giri Prasta.

Perbekel atau Kepala Desa Mekar Bhuwana, I Gusti Made Sudiana menyampaikan, dirinya beserta seluruh masyarakat desa sangat berterima kasih atas program dan kebijakan dari Bupati Giri Prasta dan Pemkab Badung yang sangat dirasakan oleh masyarakat Mekar Bhuana.

“Lima prioritas program melalui PPNSB, telah kami rasakan. Mulai dari bedah rumah, kesehatan dan pendidikan gratis hingga pelestarian seni budaya. Kami juga mampu menurunkan angka kemiskinan menjadi 170 KK di tahun 2018,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Giri Prasta bersama masyarakat desa juga meluncurkan maskot desa Mekar Bhuana, yaitu Tari Gadung Mekar dan lagu maskot Sekar Gadung. (adv)

Pemkab Badung Prioritaskan Lima Bidang Pembangunan

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, memprioritaskan pembangunan pada lima bidang, yakni pangan, sandang dan papan; pendidikan dan kesehatan; jaminan kesehatan dan tenaga kerja; adat, agama tradisi budaya dan pariwisata; serta infrastruktur.

“Permasalahan dan prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi kegiatan, telah kami sepakati dalam Musrenbang RKPDP,” kata Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Badung, Made Wira Dharmajaya, di Mangupura, Bali, Kamis.

Ia menjelaskan, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP) Badung tahun 2018 tersebut dilaksanakan dalam rangka penyusunan dokumen RKPDP Badung tahun 2019.

Menurut dia, pembahasan bersama dengan melibatkan para pemangku kepentingan itu merupakan bentuk komitmen Pemkab



Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, didampingi Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa memukul gong sebagai tanda dibukanya Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung di Ruang Kertha Gosana, Rabu (Foto Humas Pemkab. Badung)

Badung untuk melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakatnya.

“Kesejahteraan tersebut tentunya dapat kita wujudkan apabila instrumen pelaksanaannya telah direncanakan secara matang sejak awal, disusun secara komprehensif dan sesuai dengan analisa atas kebutuhan masyarakat,” katanya.

Apalagi, tatanan dari atas

ke bawah pun sudah dibuatkan rencana kerja melalui SKPD.

“Ini dibahas sejak bulan Januari mulai dari Musrenbang desa dan Murenbang kelurahan, Musrenbang kecamatan yang dilanjutkan konsultasi publik dan Musrenbang kabupaten yang akan ditindaklanjuti per-SKPD,” ujarnya.

Menanggapi langkah Pemkab Badung itu, Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali, I Wayan

Wasthana Ika Putra, menyampaikan apresiasi terhadap pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Badung.

“Meskipun demikian, dalam rangka menyalurkan dokumen perencanaan, sekaligus meningkatkan kinerja pembangunan daerah, wajib memedomani seluruh aturan yang diterapkan oleh pemerintah pusat, termasuk yang telah diselenggarakan oleh pemerintah provinsi Bali,” katanya. (adv)

Pemkab Badung Adakan Dharma Shanti Nyepi



Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa bersama Ketua Harian PHDI Badung I Gede Rudia Adiputra saat acara Dharma Canti Hari Raya Nyepi tahun Caka 1940 di Kabupaten Badung di ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Selasa (Foto Humas Pemkab. Badung)

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, menggelar Dharma Shanti Nyepi Tahun Caka 1940 di lingkungan pemerintahan Kabupaten Badung di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung.

“Pemkab Badung melaksanakan Dharma Shanti yang merupakan struktur acara yang dilaksanakannya dengan proses hari suci dalam rangkaian acara

ra Brata Nyepi melalui acara Melasti, Tawur Agung, Penyepian, Catur Brata Penyepian, dan Ngembak Geni,” ujar Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, di Mangupura, Kamis.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Suiasa juga menyampaikan apresiasi atas terlaksananya rangkaian peringatan Hari Raya Nyepi Tahun Caka 1940 yang su-

dah melaksanakan Catur Brata Penyepian untuk menyucikan diri sendiri seperti `Bhuana Alit`, dan `Bhuana Agung`.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Badung, Ida Bagus Anom Basma, mengatakan Pemerintah Kabupaten Badung setiap tahun rutin mengadakan kegiatan Dharma Shanti setelah hari raya Nyepi.

“Dalam Hari Raya Nyepi, terdapat empat tahapan, yaitu melaksanakan Melasti, Pengerupukan, Nyepi dan Dharma Shanti. Dharma Shanti artinya untuk membiasakan diri sekaligus mengevaluasi apa yang telah dilakukan selama setahun Saka ini,” katanya.

Sementara itu, Mantan Dirjen Binmas Hindu Pusat, Ida Bagus Yuda Triguna, menjelaskan, Dharma Shanti yang dilaksanakan oleh umat Hindu merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan Prosesi pelaksanaan Melasti, Peca-

ruan, Pengerupukan, dan Brata Penyepian.

“Semua prosesi yang dilakukan tersebut memiliki makna untuk menyeimbangkan, membersihkan mereposisi kembali potensi alam, `Bhuana Agung` dan potensi dalam diri kita sendiri,” ujarnya.

LHKPN

Dalam acara lain, Wakil Bupati Badung, Bali, I Ketut Suiasa mengatakan penyelenggaraan asistensi LHKPN di lingkungan Pemkab Badung ini merupakan salah satu upaya yang mengedepankan langkah pencegahan dari pada upaya penindakan terhadap tindak pidana korupsi.

Menurut Wabup Suiasa, penyelenggara negara harus memiliki integritas tinggi dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas KKN dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. (Adv)

Wabup Badung Apresiasi Upaya Bangkitkan Tradisi “Siat Yeh”

Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, mengapresiasi upaya membangkitkan kembali tradisi “Siat Yeh” atau perang air yang dilakukan warga Banjar Teba, Kelurahan Jimbaran, Kuta Selatan.

Keterangan pers yang diterima Antara dari Humas Pemkab Badung, Senin, menyebutkan Tradisi Perang Air yang digelar kembali oleh warga pada Minggu (18/3) itu memiliki makna tertentu saat dilakukan para leluhur pada zaman dahulu.

“Pasti, tradisi ini ada maknanya oleh leluhur. Meski kadang kami tidak tahu maknanya, namun hal tersebut perlu diyakini. Oleh karena itu, tradisi yang kembali dibangkitkan warga setelah vakum sejak tahun 1983 ini perlu untuk dilestarikan,” ujar Wabup Badung itu.

Wabup Suiasa mengatakan, dirinya juga sangat kagum dengan tradisi “Siat Yeh” tersebut dan berjanji akan memasukan-

nya sebagai salah satu agenda tradisi di Badung.

“Saya juga meminta Dinas Kebudayaan Badung untuk mencatat tradisi ini. Kedepannya, Pemkab Badung juga akan membantu terkait biaya. Yang jelas, kami berharap agar tradisi ini dapat ajeg (lestari),” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Suiasa menyerahkan bantuan Rp50 juta. “Pelestarian tradisi budaya seperti “Siat Yeh” ini sesuai dengan salah satu skala prioritas Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) Pemkab Badung,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Festival Budaya “Siat Yeh” ST Bhakti Asih, Bagus Cahya Dwijanata mengatakan, dirinya berterima kasih atas bantuan dari Pemkab Badung. Dia juga berharap tradisi tersebut dapat menjadi salah satu warisan budaya dunia tak benda.

“Kami berterima kasih



Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa menghadiri pelaksanaan tradisi Siat Yeh di Banjar Teba, Kelurahan Jimbaran, Kuta Selatan, Minggu (Foto Humas Pemkab. Badung)

kepada Pemkab Badung atas segala dukungannya. Selain untuk melestarikan tradisi, “Siat Yeh” juga kami jadikan ajang untuk mempersatukan warga. Tentu kami juga berharap dukungan berlanjut ke depannya,” ujarnya.

Tradisi “Siat Yeh” tersebut mempertemukan air dari `suwung`, yakni rawa sebelah timur Banjar Teba dengan pantai

sebelah barat Banjar Teba. Air tersebut diupacarai dengan ritual dan dibawa ke perempatan banjar.

Akhirnya, air tersebut dikumpulkan menjadi satu dan digunakan sebagai air untuk panglukatan agung atau penyucian diri seluruh warga banjar. Sisa dari air tersebut digunakan warga untuk tradisi “Siat Yeh”. (adv)

Badung Kucurkan Rp7 Miliar Dukung BBTf

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, mengucurkan dana sebesar Rp7 miliar untuk mendukung pelaksanaan pameran bisnis pariwisata tahunan "Bali Beyond and Travel Fair" (BBTF) 2018.

"Pameran ini sangat bermanfaat bagi Pemkab Badung yang menetapkan pariwisata sebagai bisnis inti dan tulang punggung dari daerah kami," kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, I Made Badra di Seminyak, Rabu.

Dalam pertemuan bersama dengan Asita dan media itu, Badra menjelaskan tahun ini pihaknya pertama kali mengucurkan dana itu untuk mendukung perkembangan pariwisata secara berkelanjutan.

Dana itu dianggarkan dari APBD tahun 2018 atau sekitar

10 persen dari target APBD tahun ini mencapai Rp7,2 triliun dengan Rp5,7 triliun di antaranya berasal dari pendapatan asli daerah, yakni pajak hotel dan restoran.

Tahun depan, lanjut dia, Pemkab Badung bahkan berencana akan menambah lagi anggaran untuk BBTf mencapai Rp10 miliar.

Ia mengharapkan BBTf menjadi tempat memasarkan destinasi wisata berikut dengan paket wisata kepada para operator pariwisata mancanegara.

Badra mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Bali untuk memanfaatkan BBTf sebagai ajang promosi karena mereka mendapatkan tempat yang gratis pada gerai yang disediakan di ajang tersebut.

Ia mengharapkan dalam

BBTF itu terjadi kontrak jangka panjang antara pembeli dengan penjual sehingga memberikan benefit pemasukan bagi daerah karena target kunjungan wisatawan mancanegara meningkat.

BBTF tahun kelima ini digelar 26-30 Juni 2018 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) dengan tema "Exploring the Colours of Indonesia".

Hingga saat ini sebanyak 181 operator tur dari 42 negara mengonfirmasi partisipasi selaku pembeli di ajang pameran bisnis pariwisata tahunan itu.

Penjual dari mancanegara juga ikut di antaranya dari Thailand, Myanmar, Kamboja dan Dubai Uni Emirat Arab.

Pelaku pariwisata dari sejumlah provinsi di Indonesia



Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, I Made Badra (Foto Humas Pemkab. Badung)

juga turut berpartisipasi menjadi penjual paket wisata dalam ajang eksebi pariwisata terbesar di Tanah Air itu. (adv)

Wakil Bupati Badung Buka Asistensi LHKPN



Wakil Bupati Badung, Bali, I Ketut Suiasa membuka kegiatan Asistensi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang digelar di Ruang Kertha Gosana, Puspem Kabupaten Badung (Foto Humas Pemkab. Badung)

Wakil Bupati Badung, Bali, I Ketut Suiasa membuka kegiatan Asistensi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang digelar di Ruang Kertha Gosana, Puspem Kabupaten Badung, Kamis.

"Penyelenggaraan asistensi LHKPN di lingkungan Pemkab Badung ini merupakan salah satu upaya yang mengedepankan langkah pencegahan dari pada upaya penindakan terhadap tindak pidana korupsi," ujar Wabup Suiasa.

Wabup Suiasa mengatakan, penyelenggara negara harus memiliki integritas tinggi dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas KKN dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

"Oleh karena itu, saya mengharapkan para peserta yang mengikuti penyelenggaraan asistensi LHKPN di lingkungan Pemkab Badung memiliki

komitmen serta pandangan yang sama tentang pengisian laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)," katanya.

Wabup Suiasa juga menambahkan, Pemerintah Kabupaten Badung sangat mengapresiasi kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang sangat serius memberikan perhatian serta pendampingan pengisian E-Filing melalui aplikasi E-LHKPN.

"Hal tersebut merupakan program-program strategis KPK dalam upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi khususnya di wilayah Kabupaten Badung," katanya.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Kabupaten Badung, Luh Suryaniti mengatakan, maksud dilaksanakannya Asistensi LHKPN itu adalah memberikan pemahaman tentang pengisian e-Filing melalui aplikasi e-LHKPN.

"Sedangkan tujuan pelaksanaan Asistensi LHKPN adalah untuk meningkatkan kesadaran

penyelenggara negara sebagai wajib lapor untuk segera melaporkan Harta Kekayaan yang dimiliki sebagai salah satu unsur penilaian kemajuan reformasi birokrasi sesuai dengan UU yang telah ditetapkan," katanya.

Luh Suryaniti menjelaskan, peserta dari kegiatan Asistensi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tersebut diantaranya adalah Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Struktural Eselon II, III, IV, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP).

"Kegiatan ini juga diikuti Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah, Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP), pejabat yang mengeluarkan perizinan, bendahara dan penyelenggara negara tertentu atas permintaan KPK," ujarnya. (adv)

Wakil Bupati Tutup Festival Seni Budaya Adat Kuta ke-VIII



Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, secara resmi menutup Festival Seni Budaya Adat Kuta ke-VIII, yang berlangsung di Jaba Pura Segara Desa Adat Kuta, Minggu (Foto Humas Pemkab. Badung)

Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, Minggu lalu secara resmi menutup Festival Seni Budaya Adat Kuta ke-VIII, yang berlangsung di Jaba Pura Segara Desa Adat Kuta.

Festival budaya tersebut selalu menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Kuta dikarenakan daya tarik pawai ogoh-ogoh,

lomba bleganjur dan pemilihan jegeg bungan desa adat Kuta serta aneka hiburan dan kuliner yang berada di area pantai Kuta juga selalu memanjakan wisatawan dan masyarakat.

Penutupan malam Festival Seni Budaya Adat Kuta VIII tersebut para undangan dihibur dengan penampilan Parade Gong Kebyar

Anak-Anak, serta Grand Final Pemilihan Jegeg Bungan Desa Adat Kuta tahun 2018.

Adapun untuk pengumuman pemenang Lomba Ogoh-Ogoh dan fragmen tari, kendati tidak penuh mengikuti acara, Wabup Suiasa kembali memberikan apresiasinya, sekaligus memberikan dana punia sebesar Rp 50 juta untuk mendukung Festival Seni Budaya Adat Kuta tersebut. "Atas nama Pemerintah Kabupaten Badung.

Saya merasa bangga dan mengapresiasi upaya dari masyarakat Desa Adat Kuta yang sudah melaksanakan Festival Seni Budaya Desa Adat Kuta dengan baik," ujarnya.

Suiasa mengatakan, dalam Festival Seni Budaya Desa Adat Kuta yang telah dilaksanakan 8 tahun terakhir ini, sangat jelas dan tegas konsepsi dasar filosofi dan semangat yang terkandung dalamnya. Hal itu tiada lain adalah wujud semangat dan upaya masyarakat

dalam melestarikan dan memberdayakan budaya, seni, tradisi dan agama di Bali dan khususnya di Desa Adat Kuta.

"Kami harapkan kegiatan seperti Festival Seni Budaya Kuta ini bisa dilaksanakan secara terus-menerus dan menjadi komitmen bagi masyarakat Kuta dan tidak hanya berhenti sampai disini. Akan lebih baik jika selalu ada festival-festival seni budaya selanjutnya sebagai upaya pelestarian, wadah berkreasi dan daya tarik bagi wisatawan," pungkasnya.

I Gusti Anom Gumanti menyampaikan, ia selaku tokoh masyarakat Kuta mengaku mengapresiasi atas penyelenggaraan Festival Seni Budaya Desa Adat Kuta ke-VIII, dimana kemasan tampilan tahun ini cukup apik, memberikan warna baru, pengalaman baru dan unsur universal, baik kepada masyarakat, wisatawan, utamanya bagi generasi muda di Kuta. (adv)

Giri Prasta Tanda Tangani Prasasti di Puri Pendarungan

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menandatangani prasasti saat menghadiri peresmian tembok penyengker Puri Pendarungan, Desa Pendarungan, Mengwi, Sabtu.

Hadir pada acara tersebut, tokoh masyarakat yang juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Badung I Bagus Alit Sucipta, Camat Mengwi I Gst Ngr Jaya Saputra, Perbekel Pendarungan, Bendesa Adat dan prajuru Banjar Adat serta masyarakat se-Desa Pendarungan dan Cemenggon. AA Gede Putra selaku Penglingsir Puri Pendarungan mewakili Angga Puri menjelaskan bahwa pembangunan tembok penyengker Puri ini bisa terlaksana berkat bantuan dari Pemkab Badung.

"Pembangunan penyengker yang menghabiskan dana sebesar Rp900 juta ini bisa rampung berkat bantuan Bapak Bupati Badung yang memberikan bantuan BKK (Bantuan Keuangan Khusus).," ujarnya.

Dikatakan juga bahwa pas-

emeton Merajan Puri Pendarungan terdiri dari 30 kepala keluarga dengan 132 jiwa. Mewakili angga puri, Agung Putra menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Bupati Giri Prasta. Pasalnya, kebijakan Bupati asal Pelaga ini benar-benar dirasakan keberadaannya oleh masyarakat Badung. "Berkat Pak Bupati masyarakat Badung sejahtera. Kami mewakili angga puri siap mendukung segala kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Badung," tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Bendesa Adat Pendarungan, Made Widiada. Menurutnya keberhasilan pemerintahan Badung tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Badung, namun juga Bali. "Di Pendarungan bantuan Bapak Bupati sudah sangat luar biasa, tidak hanya membantu wantilan tapi juga pembangunan yang lain. Jadi tidak berlebihan kalau masyarakat Pendarungan selalu mendukung Bapak Bupati," ujarnya.

Widiada pun mengajak ma-



Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menandatangani prasasti saat menghadiri peresmian tembok penyengker Puri Pendarungan, Desa Pendarungan, Mengwi, Sabtu (Foto Humas Pemkab. Badung)

sarakat Pendarungan untuk selalu mendoakan agar pemerintahan Giri Prasta ini berjalan lancar sehingga bisa berbuat lebih lagi untuk masyarakat Badung. "Selaku masyarakat kami mendoakan Bapak Bupati selalu sehat, sehingga bisa terus bekerja untuk masyarakat Badung," tegasnya.

Sementara itu Bupati Giri Prasta memuji bersatunya angga puri dengan masyarakat Pena-

runan. Kata dia persatuan ini harus terus dijaga. "Kami bangga Puri dan masyarakat di Pendarungan bersatu. Ini artinya masyarakatnya sejahtera, dengan persatuan yang ada ini, lanjut bupati, pihaknya tidak akan canggung dalam memberikan bantuan dan motivasi untuk desa ini. "Kalau sudah bersatu, untuk urusan pembangunan pemerintah yang menanggung," ujar Giri Prasta. (adv)



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

mengucapkan

SELAMAT HARI NYEPI
TAHUN CAKA 1940
17 Maret 2018



PT. TIRTA INVESTAMA BALI

SELAMAT HARI NYEPI
TAHUN BARU CAKA 1940
17 Maret 2018




BALI ZOO

Wishing you a peaceful
Nyepi Çaka 1940

www.bali-zoo.com Love. Conserve. Share



Angkasa Pura AIRPORTS

Gusti Ngurah Rai BALI

RAHAJENG RAHINA nyepi
TAHUN BARU SAKA 1940

www.bali-airport.com | [f](#) | [Gusti Ngurah Rai International Airport](#) | [baliairports](#) | [ngurahraairport](#)



OTORITAS JASA KEUANGAN
REGIONAL 8 BALI DAN NUSA TENGGARA

OTORITAS JASA KEUANGAN
REGIONAL 8 BALI DAN NUSA TENGGARA

Mengucapkan

Rahajeng Nyanggra Rahina

Nyepi
Tahun Baru Çaka 1940
17 Maret 2018



BUMN
Hadir untuk negeri

PLN

Karyawan/wati PT PLN (Persero) Distribusi Bali mengucapkan

SELAMAT NYEPI
Tahun Baru Çaka 1940

Semoga kesucian Nyepi
memberikan kedamaian dan keharmonisan
dalam keberagaman

www.pln.co.id